



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
UNIT KERJA : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 924137

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 595 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
6. Tanah Seluas 451 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 40.000.000



1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER Tahun 1991, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 83.009.690

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 228.300.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.661.309.690

III. HUTANG Rp. 430.080.436

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.231.229.254

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.